

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Keadaan Umum

4.1.1. Geografis

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Gubernur Provinsi Riau dan Operasional Pemerintah Daerah pada tanggal 5 Desember 1999. Peresmian pembentukan kabupaten ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 75 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Ibukota dari kabupaten ini berkedudukan di kota Pasir Pangaraian yang merupakan sebagian wilayah Kecamatan Rambah.

Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar dengan dengan awal terbentuknya memiliki 7 kecamatan yakni : Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai, dan Kecamatan Kepenuhan serta Kecamatan Kunto Darussalam.

Dilihat dari bentangan wilayah, Kabupaten Rokan Hulu berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, dan

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu lebih kurang 7,449.85 km² atau (7.88 %) dari luas wilayah Provinsi Riau. Pada Tahun 2007 kabupaten ini bert: menjadi 16 kecamatan akibat dari pemekaran kecamatan, dimana kecamatan terluas wilayahnya adalah Kecamatan Rokan IV Koto.

Ketinggian beberapa daerah/kota di kabupaten Rokan Hulu dari permukaan laut berkisar antara 10 – 164 meter di atas permukaan laut. Daerah/kota yang tertinggi adalah Rambah Samo yakni 164 meter di atas permukaan laut dan yang terendah adalah Bonai Darussalam yakni 10 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Rokan Hulu memiliki dua buah sungai besar yang salah satunya adalah Sungai Rokan.

Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur maksimum rata-rata 31^o C – 32^o C. Banyaknya hari hujan dalam Tahun 2007 yang terbanyak adalah disekitar Rambah Samo dan paling sedikit terjadinya hujan adalah sekitar Kota Tengah.

a) Kecamatan Rambah Samo

Desa Marga Mulia merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rambah Samo dan termasuk ke dalam salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, dengan luas wilayah menurut pengukuran 295.14 Km² atau (3.94 %) dari luas wilayah kabupaten. Kecamatan ini memiliki 14 desa dengan pusat pemerintahan berada di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo.

Dilihat dari bentangan wilayah, Kecamatan Rambah Samo berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Kepenuhan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ujung Batu dan Kecamatan Kunto Darussalam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rokan IV Koto
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rambah

b) Kecamatan Rambah Hilir

Desa Rambah Muda merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rambah Hilir dan termasuk ke dalam salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, dengan luas wilayah menurut pengukuran 307,99 Km² atau (4.11 %) dari luas kabupaten. Kecamatan ini memiliki 13 desa dengan pusat pemerintahan berada di Muara Rumbai..

Dilihat dari bentangan wilayah, Kecamatan Hilir berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kepenuhan dan Kecamatan Tambusai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kepenuhan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambah Samo dan Kecamatan Rambah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Tambusai.

c) Kecamatan Kabun

Desa Bencah Kesuma merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rambah Kabun dan termasuk ke dalam salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, dengan luas wilayah menurut pengukuran 392,08 Km² atau (7.19 %) dari luas kabupaten. Kecamatan ini memiliki 6 desa dengan pusat pemerintahan berada di Desa Kabun.

Dilihat dari bentangan wilayah, Kecamatan Kabun berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

4. 1. 2. Tata Guna Tanah

Tata guna tanah dapat dibedakan menjadi tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya, tegal/kebun/huma, padang rumput, lebak, kolam/tebat/empang, lahan sementara tidak diusahakan, hutan, perkebunan, sawah dan lainnya.

Luas areal Kabupaten Rokan Hulu 760.475 Ha digunakan 3.905 Ha (0.51 %) untuk tanah sawah, 756,570 Ha (99.49 %) merupakan lahan kering. Luas lahan

kering di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 persentase terbesar digunakan untuk perkebunan yaitu sebesar 42.90 %. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana luas areal perkebunan hanya sekitar 14.76 % dari total penggunaan lahan kering. Luas Tanah dan penggunaannya di Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada Tabel 6

Tabel 6. Luas Tanah dan Penggunaannya di Kabupaten Rokan Hulu Th 2007 (Ha)

No	PENGGUNAANNYA	LUAS (Ha)	PERSENTASE
1	Tanah Sawah	3,905	
2	Pekarangan/bangunan	25,564	
3	Tegal/kebun	70,278	
4	Ladang/huma	15,159	
5	Padang rumput	28	
6	Rawa/tidak ditanami	9,366	
7	Kolam	278	
8	Sementara tidak diusahakan	16,436	
9	Hutan Rakyat	42,605	
10	Hutan Negara	192,475	
11	Perkebunan	324,563	
12	Tambak	0	
13	Tanah lain-lain	60,818	
	Jumlah	760,475	

Sumber : Rokan Hulu Dalam Angka, Tahun 2007

Kecamatan Rambah Samo memiliki luas wilayah 29,314 Ha. Penggunaan lahan terbesar di kecamatan ini adalah untuk perkebunan 15,215 Ha. Luas lahan

terbesar berikutnya digunakan untuk Hutan Rakyat 3,200 Ha dan selanjutnya Tegal/kebun 2,544 Ha.

Kecamatan Rambah Hilir dengan luas wilayah 30,799 Ha peruntukkan terbesar adalah pada Tegal/kebun 14,500 Ha selanjutnya Hutan Rakyat seluas 5,000 Ha, dan Pekarangan/huma 1,989 Ha.

Luas wilayah 39,208 Ha yang dimiliki Kecamatan Kabun penggunaan terbesarnya pada Hutan Negara seluas 30,573 Ha, menyusul Perkebunan 20,067 Ha selanjutnya Pekarangan/bangunan 1,530 Ha.

Tanaman perkebunan merupakan salah satu primadona komoditi perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, kopi dan lain-lain. Pengembangan perkebunan di kabupaten ini dilakukan melalui Pola Swadaya, Pola UPP (Unit Pelayanan Pengembangan) dan Pola PIR (baik PIR-BUN maupun PIR kemitraan) untuk perkebunan rakyat, sedangkan untuk perkebunan besar dilaksanakan melalui Pola PIR (Inti) oleh perusahaan perkebunan swasta/BUMN. Data luas, jumlah produksi komoditi perkebunan dan jumlah petani dapat dilihat pada Tabel 7

Tabel 7. Luas Tanam dan Produksi Komoditi Unggulan di Tiga Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007

No	KOMODITI	LUAS TANAMAN			PRODUKSI		
		Rambah Samo	Rambah Hilir	Kabun	Rambah Samo	Rambah Hilir	Kabun
1	2	3	4	5	6	7	
1	Karet	5,369.55	2,240	2,355.00	699.56	155,468.00	3,907.00
2	Kelapa	127.09	2,316	877	32.6	13.2	10,750.00
3	Kelapa Sawit	16,904.75	1,617	4,312.00	3,564.60	79,191.00	7,032.00
4	Kopi	21.2	286	0	2.1	0.6	0
5	Kakao/Coklat	0.53	27	0	0.1	1.8	0
6	Enau	8.2	2	0	58.9	0.3	0
7	Pisang	30.3	278	105	44.1	4.25	0.36

Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka, BPS. 2007

Tabel 7 menunjukkan bahwa komoditi yang dominan di tiga kecamatan adalah karet, kelapa dan kelapa sawit. Komoditi karet dan kelapa sawit luas tanam terbesar terletak di Kecamatan Rambah Samo, sedangkan pada komoditi kelapa di Kecamatan Rambah Hilir. Komoditi kopi, kakao, enau dan pisang memiliki luas tanam yang kecil dibanding dengan tiga komoditi terdahulu.

Komoditi padi merupakan komodi yang juga dihasilkan di Kabupaten Rokan Hulu. Komoditi Padi sawah, luas panen dan produksi terbesar dihasilkan di Kecamatan Rambah Samo, sedangkan untuk komoditi padi ladang luas panen dan produksi terbesar dihasilkan di Kecamatan Rambah Hilir.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu daerah penghasil ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan domba disamping perkebunan dan padi sawah atau padi ladang. Ternak ini dipasok ke berbagai daerah kabupaten/kota di provinsi ini. Pengembangan sektor kehutanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat dengan tetap memelihara kelestarian sumber daya alam, fungsi hutan, lingkungan hidup, tata air dan lain-lain.

4. 1. 3. Kependudukan

Salah satu ciri demografi di Indonesia adalah penyebaran penduduk yang tidak merata, dan jumlah penduduk perempuan yang lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Dari hasil registrasi penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada akhir Tahun 2007 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 385,425 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 195,695 jiwa (50.776 %) dan perempuan 189,730 jiwa (49.23 %) (Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka, BPS,2005). Dari data pada Tabel 8 terlihat bahwa di Kabupaten Rokan Hulu jumlah penduduk laki-laki berimbang dengan penduduk perempuan.

Jumlah rumah tangga secara keseluruhan tercatat 90.049 rumah tangga. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sebesar 385,425 jiwa, maka menunjukkan tiap-tiap rumahtangga terdiri dari 4 jiwa. Membandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu seluas 7,449.85 km² dengan jumlah penduduk di kabupaten ini, maka kepadatan penduduk sampai akhir tahun 2007 rata-rata 51 jiwa dimana terjadi peningkatan 7 jiwa per km² dibandingkan dengan Tahun 2005 yang hanya 45 jiwa per km². Jumlah penduduk, Jumlah Rumah Tangga, Penduduk per Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 8

Tabel 8. Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, Penduduk per-Rumah Tangga Dan Kepadatan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH TANGGA	LUAS WILAYAH (KM2)	PENDUDUK PER RUMAH TANGGA	KEPADATAN PENDUDUK (KM2)
1	2		4	5	6	7
1	Rokan IV Koto	20,531	4,515	904.07	4.55	23
2	Pendalian iV Koto	9,257	2,204	219.28	4.20	44
3	Tandun	23,757	5,636	386.99	4.22	61
4	Kabun	19,422	4,512	539	4.30	36
5	Ujung Batu	30,947	7,554	90.57	4.10	342
6	Rambah Samo	25,534	7,335	295.14	3.48	87
7	Rambah Samo	35,221	7,486	396.66	4.70	89
8	Rambah Hilir	29,385	7,412	307.99	3.96	95
9	Bangun Purba	14,293	3,474	219.99	4.11	65
10	Tambusai	31,022	8,032	1,127.50	3.86	28
11	Tambusai Utara	53,136	10,848	682.25	4.90	78
12	Kepenuhan	17,882	4,671	683.26	3.83	26
13	Kepenuhan Hulu	12,427	3,057	231.67	4.07	54
14	Kunto Darussalam	31,279	7,893	507.39	3.96	62
15	Pagaran Tapah Ds	15,253	3,866	115.59	3.95	132
16	Bonai Darussalam	16,079	1,918	800.23	8.38	20
JUMLAH		385,425	90,049	7,498	4.28	51

Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka, BPS.2007

Berdasarkan data BPS Tahun 2007 diatas maka jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu 385,425 jiwa yang tersebar pada 90,049 rumah. Kepadatan penduduk 51 jiwa per km² dengan 4 jiwa per rumah tangga

Melihat kepada jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di tiga kecamatan yang menjadi lokasi penelitian, maka di Kecamatan Rambah Samo yang terdiri dari 14 desa memiliki 25,533 jiwa yang berasal dari 7,335 rumah tangga dan berada pada luasan pada 295,14 km², dengan demikian tingkat kepadatan penduduk 87 jiwa per km² dengan 3 jiwa per rumah tangga. Desa Marga Mulia sebagai salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Rambah Samo dan menjadi lokasi penelitian memiliki 2,025 jiwa penduduk yang berasal dari 635 rumah tangga pada luasan 23.00 km², dengan demikian di desa ini tingkat kepadatan penduduk 88 jiwa per km² dengan 3 jiwa per rumah tangga.

Kecamatan Rambah Hilir yang terdiri dari 13 desa memiliki 29,385 jiwa yang berasal dari 7,412 rumah tangga yang berada pada luasan 307.99 km², dengan demikian tingkat kepadatan penduduk 95 jiwa per km² dengan 4 jiwa per rumah tangga. Desa Rambah Muda sebagai salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Rambah Hilir dan menjadi lokasi penelitian memiliki 3,368 jiwa yang berasal dari 779 rumah tangga pada luasan 31.20 km², dengan demikian di desa ini tingkat kepadatan penduduk 108 jiwa per km² dengan 4 jiwa per rumah tangga.

Kecamatan Kabun yang terdiri dari 6 desa memiliki 19,421 jiwa yang berasal dari 4,512 rumah tangga yang berada pada luasan 392,08 km², dengan demikian tingkat kepadatan penduduk 50 jiwa per km² dengan 4 jiwa per rumah tangga. Desa Bencah Kesuma sebagai salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kabun dan menjadi lokasi penelitian memiliki 2,315 jiwa yang berasal dari 779 rumah tangga

pada luasan 15.00 km², dengan demikian di desa ini tingkat kepadatan penduduk 154 jiwa per km² dengan 5 jiwa per rumah tangga.

Berdasarkan data pada tiga desa dan 3 kecamatan di atas, maka untuk tingkat kecamatan kepadatan penduduk tertinggi ditemui di Kecamatan Rambah Hilir dengan tingkat kepadatan 95 jiwa per km² dibandingkan dua kecamatan lainnya yang hanya 87 jiwa dan 50 jiwa per km². Tingkat desa kepadatan tertinggi juga terdapat di Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir dengan kepadatan 108 jiwa per km². Jumlah penduduk per rumah tangga terbesar terdapat di desa Bencah Kesuma Kecamatan Kabun yakni 5 jiwa per rumah tangga dan terkecil Desa Marga Mulia Kecamatan Kabun dengan 3 jiwa per rumah tangga.

1. 4. Prasarana dan Sarana

1.4.1. Prasarana Jalan

Pembangunan prasarana jalan mutlak diperlukan guna memperlancar arus barang dan jasa dan membuka keterisolasian daerah-daerah yang jauh dari pusat kegiatan dan pemerintahan. Pembangunan jalan-jalan baru dan peningkatan kualitas jalan yang ada dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang secara langsung memberikan manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Panjang jalan kabupaten di Rokan Hulu berdasarkan data Tahun 2007 adalah 1,782.409 km yang terdiri dari jalan provinsi 347.270 km dan jalan kabupaten 1,435.139 km. Jalan tersebut sebagian besar 443.815 km (25 %) sudah diaspal, jalan

kerikil 579.831 km (32.53 %), dan jalan tanah 994.483 km (55,80 %). Keadaan jalan tersebut sepanjang 867,201 km (48.65 %) dalam kondisi baik, 381.145 km (21.38 %) dalam kondisi rusak dan 15.55 km (0,87 %) rusak berat.

Kecamatan Rambah Samo memiliki jalan sepanjang 96.60 km dimana 14 km merupakan jalan provinsi yang sudah diaaspal, sepanjang 40 km (41.40 %) dalam kondisi baik dan 28.90 km (29.92 %) dalam kondisi rusak serta selebihnya dalam kondisi sedang.

Rambah Hilir memiliki jalan sepanjang 130.23 km dimana 40 km (41.41 %) merupakan jalan provinsi yang sudah diaspal, sepanjang 76.23 km (58.53%) dalam kondisi baik dan 27.14 km (20,84 %) dalam kondisi rusak serta selebihnya dalam kondisi sedang. Kecamatan Kabun dengan jalan sepanjang 53.39 km dan berada dalam kondisi baik.

Jalan dengan panjang jalan dan kondisi jalan tersebut sehari-harinya dilalui oleh 136 buah bus, sebuah oplet, 1,000 buah oplet, 2,390 buah truk, dua buah head traktor, dan dua buah kendaraan tempelan serta sebuah tangki guna menunjang aktifitas pemerintahan, aktifitas ekonomi masyarakat di kabupaten ini.

1.4.2. Sarana Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat guna merubah perilaku melalui peningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap kearah yang lebih baik. Kualitas sumber daya manusia sangat erat kaitannya

dengan kualitas pendidikan, dimana kualitas pendidikan yang baik tidak akan mungkin tercapai apabila sarana pendidikan tidak tersedia dengan cukup. Guna meningkatkan kualitas pendidikan ini dibutuhkan sarana pendidikan dan ketersediaan guru yang memadai dan berkualitas.

Pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu diselenggarakan oleh sekolah-sekolah negeri dan sekolah swasta. Jenjang pendidikan di kabupaten ini tersedia mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga ke jenjang Perguruan Tinggi. (PT), disamping itu juga tersedia sekolah untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tabel 9 menggambarkan ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 9. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	SEKOLAH	GURU	MURID
1	2	3	4	5
1	TK	156	554	5,795
2	SD	325	4,052	64,747
3	SLTP	77	1,377	14,775
4	SMU	28	660	7,561
5	SMK	9	227	2,454

Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka, BPS.2007

Ketersediaan sarana pendidikan di tiga desa dan tiga kecamatan yang menjadi lokasi penelitian sangat menentukan kualitas Sumber Daya Manusia di daerah tersebut. Jumlah lembaga pendidikan, jumlah guru dan jumlah murid dapat dilihat pada Tabel 10 dibawah ini

Tabel 10. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Di Lokasi Penelitian Tahun 2007

N O	TINGKAT PENDIDIKAN	KECAMATAN			DESA		
		RS	RH	KBN	MM	RM	BK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TK :						
	a. Sekolah	14	11	7	2	2	1
	b. Guru	41	42	19	6	5	3
	c. Murid	359	435	309	60	84	52
2	SD						
	a. Sekolah	26	31	12	2	4	2
	b. Guru	309	437	150	25	36	19
	c. Murid	3,467	4,793	3,334	391	466	405
3	SLTP						
	a. Sekolah	4	11	3	1	1	1
	b. Guru	91	158	0	10	24	8
	c. Murid	1,071	1,243	1,053	68	264	242
4	SMTA						
	a. Sekolah	1	1	1	0	0	0
	b. Guru	28	18	14	0	0	0
	c. Murid	502	55	225	0	0	0

Sumber : Kecamatan Rambah Samo, Rambah Hilir, dan Kabun Dalam Angka, BPS, 2007

Tabel 10 menunjukkan bahwa pada ke tiga desa belum terdapat sekolah pada jenjang pendidikan SMTA, bagi masyarakat miskin kondisi tersebut tentunya akan menjadi kendala bagi kelompok masyarakat ini akses pada layanan pendidikan ke jenjang SMTA. Untuk dapat akses kepada layanan pendidikan tersebut tentunya

membutuhkan biaya yang lebih besar karena harus keluar dari desanya. Untuk mewujudkan manusia berkualitas faktor pendidikan merupakan faktor yang sangat penting terutama bagi masyarakat miskin.

Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Rokan Hulu selain sarana pendidikan diatas saat ini di kabupaten ini telah tersedia perguruan tinggi seperti Politeknik Pertanian Rokan Hulu (POLIPERA), Akademi Kebidanan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE).

1.4.3.Sarana Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan dimaksudkan agar seluruh lapisan masyarakat mendapat kesempatan pelayanan kesehatan secara merata, mudah dan murah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat karena dengan tubuh dan jiwa yang sehat seseorang dapat memaksimalkan produktivitasnya dan sulit diharapkan dari individu yang tidak sehat akan keluar pemikiran yang sehat. Dalam rangka menciptakan kesehatan yang prima bagi masyarakat maka pemerintah harus berusaha untuk senantiasa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Untuk terlaksananya pelayanan yang baik, maka diperlukan pembangunan fasilitas kesehatan baik Rumah Sakit, Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Bersalin, Dokter Praktek atau Posyandu. Guna berfungsinya sarana kesehatan yang dapat menunjang peningkatan pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan tenaga kesehatan seperti Dokter, Mantri Kesehatan/Perawat, Bidan, dan Dukun Beranak.

Kondisi sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada Tabel 11

Tabel 11 Jumlah Sarana Kesehatan Dan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (Unit/Orang)
1	Sarana Kesehatan	
	a. Rumah Sakit	4
	b. Puskesmas	16
	c. Puskesmas Pembantu	80
	d. Puskesmas Keliling	16
	e. Posyandu	459
2	Tenaga Kesehatan	
	a. Dokter Umum (PNS)	20
	b. Dokter Umum (PTT)	12
	c. Dokter Spesialis	7
	d. Dokter Gigi (PNS)	7
	e. Dokter Gigi (PTT)	11
	f. Bidan	158
	g. Perawat dan Pembantu	152

Sumber : Rokan Hulu Dalam Angka, BPS, 2007

Tabel 11 diatas memberikan gambaran bahwa di kabupaten Rokan Hulu telah tersedia sarana kesehatan yang lengkap mulai dari Rumah Sakit hingga ke Posyandu. Di kabupaten ini pemerintah telah mempersiapkan sarana kesehatan bagi masyarakat yang berada pada daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan dan sulit dijangkau melalui pelayanan Puskesmas Keliling, sehingga masyarakat yang miskin atau berada

jauh dari fasilitas kesehatan tidak terbatas untuk dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan.

Tenaga medis yang tersedia guna memberikan pelayanan kepada masyarakat di kabupaten ini tersedia mulai dari perawat, bidan hingga ke dokter, disamping itu juga tersedia dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis. Ketersediaan fasilitas kesehatan di kecamatan dan desa penelitian dapat dilihat pada Tabel 12

Tabel 12 Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Di Tiga Desa dan Tiga Kesamatan Lokasi Penelitian 2007

N O	URAIAN	KECAMATAN			DESA		
		RS	RH	KBN	MM	RM	BK
1	Sarana Kesehatan						
	a. Rumah Sakit	0	9	0	0	0	0
	b. Puskesmas	2	2	1	0	1	0
	c. Puskesmas Pembantu	4	8	4	1	0	1
	d. Puskesmas Keliling	1	1	0	0	0	0
	e. Posyandu	50	45	29	1	0	2
2	Tenaga Kesehatan						
	a. Dokter Umum (PNS)	1	3	1	0	0	0
	b. Dokter Umum (PTT)	3	2	0	0	0	0
	c. Dokter Spesialis	0	0	0	0	0	0
	d. Dokter Gigi (PNS)	2	0	1	0	0	0
	e. Dokter Gigi (PTT)	1	2	0	0	0	0
	f. Bidan	14	14	9	1	2	1
	g. Perawat dan Pembantu	11	12	9	0	3	1
	g. Dukun Beranak	0	0	0	1	4	2

Sumber : Rokan Hulu Dalam Angka, BPS.2007

Berdasarkan Tabel 12, tiga kecamatan yang menjadi lokasi penelitian (Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Hilir, dan Kecamatan Kabun) telah memiliki sarana kesehatan berupa Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling, kecuali di Kecamatan Kabun belum memiliki Puskesmas Keliling.

Dilihat dari tenaga kesehatan yang melayani masyarakat di tiga desa penelitian (Desa Marga Mulia, Desa Rambah Muda, dan Desa Bencah Kesuma) hanya dilayani oleh Bidan, Perawat, Perawat Pembantu, dan Dukun Beranak, Ketersediaan dokter baik dokter umum, dokter spesialis, maupun dokter gigi ketersediaannya baru pada tingkat kecamatan dan belum terlihat di ketiga desa, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat di tiga desa penelitian cukup sederhana, sehingga masyarakat harus melakukan rujukan ke luar dari desa jika penyakit yang diderita oleh masyarakat tidak bisa diatasi oleh tenaga bidan, perawat, dan dukun beranak yang ada.

1.4.4. Sarana Ekonomi

Sarana ekonomi sangat dibutuhkan masyarakat guna menunjang kelancaran aktivitas ekonomi yang dilakukan. Keberadaan pasar sebagai tempat bertemunya produsen (yang memproduksi) dan konsumen (yang membutuhkan) sangat membantu dalam memperlancar arus barang dan jasa. Karena pasar merupakan tempat berinteraksinya kedua pihak guna menepakati terhadap harga dan jumlah barang yang dibutuhkan oleh produsen dan ditawarkan oleh konsumen. Ketidaktersediaan pasar akan menjadi penghambat bagi masyarakat desa (termasuk masyarakat miskin)

dalam memasarkan produksi yang dihasilkan dan mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Kondisi akan mengakibatkan jauh (jarak) atau panjangnya rantai pemasaran yang berakibat kepada besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen (orang yang menghasilkan) maupun konsumen (orang yang membutuhkan) sehingga harga beli atau jual suatu barang dan jasa menjadi sangat tinggi atau mahal.

Ketidak beradaan pasar di desa akan dapat diatasi melalui pemilikan atau tersedianya warung, kios, atau kedai di desa. Dengan kondisi ini masyarakat desa akan mendapatkan barang dengan harga tepat dan pada waktu yang cepat terhadap apa yang dibutuhkan. Disisi lain keberadaan koperasi atau yang sejenisnya akan sangat membantu masyarakat desa dalam menjalankan aktivitas ekonomi guna membantu memasarkan atau menyediakan komoditi yang dibutuhkan, faktor dan sarana produksi yang dibutuhkan, maupun kebutuhan masyarakat desa terhadap modal guna melakukan kegiatan usahatani. Ketersediaan sarana ekonomi di kecamatan dan desa yang menjadi lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 13

Berdasarkan Tabel 12 terlihat bahwa ketersediaan sarana ekonomi seperti pasar, toko, kios/warung di Kecamatan Rambah Hilir lebih banyak dibanding dua kecamatan lainnya. Ketersediaan sarana ekonomi di ke tiga desa penelitian yaitu : pasar, kios/warung dan KUD, akan tetapi ketersediaan sarana permodalan seperti Bank hanya terdapat pada Kecamatan Rambah Samo, karena kecamatan ini berada di pusat pemerintahan sehingga tersedia sarana permodalan di kecamatan ini.

Tabel 13. Jumlah Dan Jenis Sarana Ekonomi Yang Tersedia Di Kecamatan dan Desa Penelitian Tahun 2007

NO	Jenis Sarana Ekonomi	KECAMATAN			DESA		
		RS	RH	KBN	MM	RM	BK
1	Pasar Umum	4	8	4	1	1	1
	Pasar Hewan	0	0	0	0	0	0
	Toko	0	86	26	0	5	1
	Kios/ Warung	331	403	123	32	37	9
	KUD	1	2	2	1	0	1
	Bank	1	0	0	0	0	0
	Lumbung Desa	0	0	0	0	0	0

Sumber : Kecamatan Rambah Samo, Rambah Hilir, dan Kabun Dalam Angka, BPS, 2007

2. Kemiskinan

Melihat jumlah penduduk dan rumah tangga miskin pada suatu daerah akan memberikan gambaran terhadap keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan pembangunannya. Keberhasilan pembangunan akan tergambar dari minimnya jumlah penduduk dan rumah tangga miskin yang ditemui di daerah tersebut. Data jumlah penduduk dan rumah tangga miskin di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada Tabel 15.

Dari menggambarkan bahwa persentase penduduk dan rumah tangga miskin yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu masih tergolong besar (28,35 %) dan (32,30 %). Kondisi ini menuntut komitmen pemerintah daerah dalam mengupayakan penanggulangan kemiskinan sehingga angka kemiskinan yang besar tersebut bisa dikurangi.

Tabel 14. Jumlah dan Persentase Penduduk dan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH (Jiwa)	PERSENTASE
1	Penduduk	351,179	
1	Rumah Tangga	78,845	
1	Penduduk Miskin	99,556	28.35
1	Rumah Tangga Miskin	25,466	32.30

Sumber : Balitbang, 2005 dalam Master Plan Kemiskinan di Kab. Rohul, 2007

Kondisi rumah tangga miskin di Kabupaten Rokan Hulu dapat tergambar dari keadaan perumahan yang dihuni oleh masyarakat miskin seperti yang tergambar pada Tabel 15 dibawah ini.

Masyarakat di Desa Boncah Kesuma sudah memiliki perumahan dan pemukiman yang sudah lebih baik dibanding dua desa lainnya (Desa Marga Mulia dan Desa Rambah Muda), data menggambarkan bahwa 100 % masyarakat di Desa Bencah Kesuma sudah memiliki perumahan dengan ciri-ciri lantai ubin, dinding tembok atau semi tembok, atap genteng, sumur pompa atau sumur.

Masyarakat di desa ini sudah tidak lagi memiliki perumahan yang berlantaikan tanah dan tidak memanfaatkan air sungai atau mata air lainnya untuk memenuhi kebutuhan airnya. Pengetahuan masyarakat desa tentang pola hidup sehat sudah baik dan terlihat dari sanitasi yang sudah mengikuti saran standar kesehatan dimana seluruh masyarakat sudah memiliki kakus/jamban sendiri sehingga masyarakat sudah tidak melakukan pembuangan kotoran dengan menggali lubang

pada tanah atau melakukan pembuangan kotoran ke sungai yang akan menyebabkan tercemarnya air sungai.

Tabel 15. Keadaan Bangunan Tempat Tinggal, Listrik, dan Kakus di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007

N O	URAIAN	KECAMATAN			DESA		
		RS	RH	KBN	MM	RM	BK
1	Lantai						
	a. Ubin	6,310	6,565	3,751	515	836	535
	b. Tanah	140	161	50	27	13	0
	c. Lainnya	260	766	86	43	17	0
2	Dinding						
	a. Tembok	3,186	3,593	1,782	179	527	200
	b. Semi tembok	1,488	1,649	900	56	253	200
	c. :Lainnya	2,036	2,250	1,205	350	86	135
3	Atap						
	a. Genteng/Seng	6,710	7,466	3,887	585	860	535
	b. Ijuk	0	0	0	0	0	0
	c. Lainnya	0	46	0	0	6	0
4	Sumber air						
	a. Sumur pompa	126	113	802		21	234
	b. Sumur	5,350	3,698	3,577	415	537	272
	c. Sungai	553	2,749	133	0	24	0
	d. Mata air	1,306	702	0	220	197	0
	e. Lainnya	0	150	0	0	0	0
5	Bahan Bakar						
	a. Minyak tanah	1,434	2,902	2,363	52	155	255
	b. Kayu Bakar	5,829	4,248	1,567	583	593	159

	c. Gas/Listrik	72	262	582	0	31	92
	d. Lainnya	0	0	0	0	0	0
6	Penerangan						
	a. Listrik	2,999	4,679	983	230	334	288
	b. Minyak tanah	4,366	2,733	3,529	360	445	218
	c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
7	Kakus/ Jamban						
	a. Sendiri	4,353	3,811	3,638	454	733	506
	b. Bersama	36	202	53	0	0	0
	c. Umum	0	0	821	0	0	0
	d. Lainnya	2,956	3,399	0	181	46	0

Sumber : Kecamatan Rambah Samo, Rambah Hilir, dan Kabun Dalam Angka, BPS, 2007

3. Karakteristik Responden Pemanfaat Program PPD

Responden sebagai kepala keluarga beserta anggota keluarga dalam melakukan aktivitas ekonomi dan non ekonomi pada kehidupan sehari-hari bertujuan untuk memperoleh imbalan (pendapatan) guna memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga.

Produktivitas yang dihasilkan oleh kepala keluarga beserta anggota keluarganya tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur, tingkat pendidikan, pekerjaan yang dilakukan (pekerjaan utama atau sampingan) dan luas lahan yang dimiliki, serta kepemilikan aset yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan.

3.1. Umur

Penduduk yang dimiliki suatu daerah merupakan kekuatan bagi daerah yang bersangkutan dalam melaksanakan aktifitas pembangunan di segala bidang. Komposisi penduduk yang seimbang baik berdasarkan jenis kelamin dan tingkat umur dengan sumber ekonomi yang dimiliki akan memperoleh pendapatan yang setara dengan perkembangan penduduknya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tidak terlepas dari struktur umur dari seseorang. Menurut Latief dalam Yasin (1996), angkatan kerja berusia produktif berkisar antara 15 – 55 tahun. Data memperlihatkan tingkat umur responden peserta program PPD pada Tabel 16.

Tabel 16. Distribusi Umur Responden Pemanfaat Program PPD

No	Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase
1	15 - 25	2	1.82
2	26 - 36	10	9.09
3	36 - 45	36	32.73
4	46 - 55	35	31.82
5	56 - 65	20	18.18
6	> 65	7	6.36
Jumlah		110	100.00

Data menggambarkan bahwa responden termasuk usia produktif sebesar 75,46 persen (umur 15 -55 tahun). Kelompok ini merupakan potensi sebagai tenaga kerja produktif. Penduduk pada usia umumnya dapat lebih mudah mengadopsi dan merespon hal-hal baru (inovasi) yang dapat membangun dan mengembangkan usaha

ekonomi yang sedang dijalankan sehingga berdampak positif terhadap pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

3.2. Pendidikan

Sumber daya manusia merupakan tumpuan masa depan bagi kemajuan pembangunan di masa yang akan datang. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas profesionalisme dan persaingan di semua bidang semakin tajam. Perkembangan penggunaan teknologi produksi yang semakin moderen berdampak pada penggunaan tenaga kerja yang memiliki skill. Untuk itu sumber daya manusia dituntut untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut melalui jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.

Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, adopsi terhadap teknologi baru, pemanfaatan lahan dan faktor produksi lainnya secara efektif dan efisien. Latar belakang pendidikan yang dimiliki akan mendukung kemampuan seseorang dalam mengelola anggota keluarga sebagai sumber tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga mampu memberikan pendapatan bagi anggota keluarga. Dengan tingkat pendidikan yang sudah baik akan mampu memberdayakan sumber daya manusia guna melakukan aktivitas ekonomi yang akhirnya akan mampu memberdayakan ekonomi keluarga untuk memperbaiki taraf hidup ke arah yang lebih baik atau keluar dari kemiskinan yang dihadapi. Data pendidikan responden pemanfaat program PPD disajikan pada Tabel 17 dibawah ini.

Tabel 17. Tingkat Pendidikan Responden Pemanfaat Program PPD

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak tamat SD	14	12.73
2	SD	61	55.45
3	SMTp	17	15.45
4	SMTA	14	12.73
5	PT	4	3.64
Jumlah		110	100.00

Pendidikan merupakan salah satu modal manusia yang dimiliki rumah tangga miskin. Data memperlihatkan tingkat pendidikan responden bervariasi mulai dari tidak tamat SD hingga pada yang sudah mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi. Terdapat 3.64 persen responden telah mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi dan sebagian besar responden mengenyam pendidikan SD (68,18 persen). Hal ini menggambarkan pendidikan formal yang dimiliki responden relatif rendah. Gambaran tingkat pendidikan yang demikian akan menghambat penerimaan inovasi dalam proses memberdayakan sumber daya manusia peserta program PPD. Kedepan peningkatan pendidikan penduduk guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu mendapatkan perhatian dan prioritas pemerintah daerah. Program pendidikan perlu diarahkan untuk menciptakan manusia yang terampil, berkualitas, disiplin dan profesional.

Program-program pendidikan seperti program belajar 9 taun, pembebasan SPP dan pemberian beasiswa, peningkatan kualitas tenaga pengajar, pengadaan tenaga pengajar melalui sistem kontrak, dan lain sebagainya perlu tetap dilanjutkan,

karena kualitas sumber daya manusia yang rendah akan berpengaruh kepada kemampuan mengelola aktivitas ekonomi yang dijalankan sehingga akan berdampak terhadap keberdayaan ekonomi dan menjadi semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan.

3.3. Tanggungan Keluarga

Perlu disadari bahwa sumber daya manusia merupakan tumpuan bagi kemajuan pembangunan di masa depan. Anggota keluarga yang besar dan berada pada usia produktif dapat menjadi sumber tenaga kerja dalam keluarga, akan tetapi sebaliknya menjadi beban tanggungan keluarga jika mereka berada pada usia non produktif.

Anggota keluarga yang produktif dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas ekonomi guna memenuhi kebutuhan keluarga. Anggota keluarga ini dapat menambah *income* (pendapatan) keluarga, sementara anggota keluarga yang berada pada usia non produktif akan menambah pengeluaran rumah tangga yang menjadi beban tanggungan keluarga. Tabel 18 menggambarkan jumlah anggota keluarga responden pemanfaat program PPD.

Tabel 18. Distribusi Jumlah Tanggungan Keluarga Responden Pemanfaat Program PPD

No	Jumlah Tanggungan Keluarga	Jumlah	Persentase
	0 - 3	50	45.45
	4 - 6	49	44.55
	7 - 9	9	8.18
	9 - 10	1	1.82
Jumlah		110	100.00

Tabel 18 menggambarkan jumlah tanggungan keluarga yang berkisar antara nol sampai 10, dimana persentase terbesar berada pada 0 sampai tiga, dan empat sampai enam.

3.4. Luas Lahan

Lahan sebagai faktor produksi yang dimiliki oleh petani dapat dilihat dari luas kepemilikan dan status kepemilikan dari lahan tersebut. Di sektor pertanian luas lahan yang diusahakan menggambarkan skala usaha yang akan berpengaruh terhadap efisien atau tidaknya suatu usaha. Distribusi luas kepemilikan lahan petani pemanfaat program PPD tergambar pada Tabel 19.

Tabel 18. Distribusi Responden Pemanfaat Program PPD Berdasar Luas Kepemilikan Lahan

No	Luas Lahan	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	0 - 5	92	83.64
2	5.1 - 10	10	9.09
3	10.1 - 15	5	4.55
4	15.1 - 20	3	2.73
Jumlah		110	100.00

Distribusi luas kepemilikan lahan responden bervariasi mulai dari sebagai buruh yang tidak memiliki lahan hingga kepemilikan lahan 20 hektar. Persentase terbesar responden memiliki luas lahan dibawah lima hektar dan hanya sebagian kecil responden memiliki lahan diatas 15 hektar. Sebagian besar responden merupakan petani pemilik terhadap lahan yang diusahakan. Status kepemilikan lahan disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20. Distribusi Responden Pemanfaat Program PPD Berdasar Status Kepemilikan Terhadap Lahan

No	Status Terhadap Lahan	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	Buruh Tani	26	23.64
2	Penyewa	2	1.82
3	Pemilik	82	74.55
	Jumlah	110	100.00

3.5. Jenis Pekerjaan Responden

Pekerjaan utama dari responden pemanfaat program PPD sebagian besar adalah sebagai petani (95,45 persen). Terdapat sebagian kecil responden (4,55 persen) yang berstatus sebagai pegawai negeri seperti guru. Distribusi responden berdasarkan pekerjaan utama yang ditekuni disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Distribusi Responden Pemanfaat Program PPD Berdasar Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	Tani	97	88.18
2	Buruh Tani	2	1.82
3	PNS	6	5.45
4	Dagang	2	1.82
5	Lain-lain	3	2.73
Jumlah		110	100.00

4. Keberdayaan Petani

Kabupaten Rokan Hulu sebagai kabupaten baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar sudah tentu memiliki permasalahan sosial seperti kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Program Pemberdayaan Desa (PPD) sebagai salah satu program yang dilaksanakan di kabupaten ini bertujuan menanggulangi kemiskinan melalui pendekatan konsep "Tri Daya" pada masyarakat miskin.

Keberhasilan program dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari konsep tridaya yang diterapkan dalam memberdayakan masyarakat miskin yakni keberdayaan sumber daya manusia, keberdayaan ekonomi produktif, dan keberdayaan kelembagaan masyarakat petani.

4.1. Keberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan sumber daya manusia masyarakat miskin dalam pembangunan menjadi penting karena manusia merupakan komponen penting

penopang pembangunan. Dampak program terhadap keberdayaan sumber daya petani disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22. Dampak Program Terhadap Keberdayaan Sumber Daya Manusia Petani

No	Dampak Program	Skor
1	2	3
1	Keberdayaan SDM	
	a. Pendidikan	13.08
	b. Sikap Terhadap Pekerjaan	15.70
	c. Tata Nilai	39.12
	Jumlah	67.90
	Tingkat Keberdayaan	Tinggi

Sumber : Data primer (Olahan)

Data Tabel 22 menggambarkan bahwa dampak program terhadap keberdayaan sumber daya manusia petani secara keseluruhan berada pada katagori tinggi. Faktor pendidikan merupakan faktor yang kurang mendukung terhadap keberdayaan sumber daya petani dibanding dua faktor lainnya, hal ini terlihat bahwa sebagian besar (68,18 persen) petani pemanfaat program hanya memiliki pendidikan SD dan sebagian tidak tamat. Untuk mewujudkan manusia berkualitas faktor pendidikan menjadi sangat penting. Hasil penelitian Inkeles dan Smith menjumpai bahwa pendidikan adalah yang paling efektif untuk mengubah manusia. Dampak pendidikan tiga kali lebih kuat dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya (Budiman, 1995: 35).

Disamping pendidikan menurut Soewardi (2002: 116) yang menyebabkan rendahnya kualitas SDM Indonesia adalah: (1) Tiadanya orientasi ke depan; (2) tidak ada *growth philosophy*; (3) cepat menyerah; (4) berpaling dari akhirat; dan (5) lamban atau hidup dalam suasana santai.

Walau tingkat pendidikan petani sebagian besar rendah namun faktor tata nilai maju (39,12) dan sikap terhadap pekerjaan (15,70) sangat berperan dalam mendukung keberdayaan sumber daya manusia petani. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar peserta program merupakan warga peserta transmigrasi yang merupakan suku Jawa. Kelompok ini sudah dikenal sebagai kelompok yang rajin, pekerja keras, ulet dan pantang menyerah. Menurut Pranadji (2003: 163), disamping faktor pendidikan tata nilai maju juga ikut menentukan kualitas SDM di pedesaan.

Melihat pada kondisi nyata di lapangan, maka sudah sewajarnya lembaga pemerintah memberikan kepedulian atau konsen yang penuh terhadap pendidikan.

4.2. Keberdayaan Ekonomi

Peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional sudah tidak dapat disangkal lagi, hal ini dapat dilihat dari perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pencipta kesempatan kerja dan lain sebagainya.

Sektor ini merupakan sumber mata pencaharian sebahagian besar petani miskin/kecil ini umumnya berdomisili di pedesaan dimana sebagian besar masih tetap miskin. Data BPS (2006) menunjukkan bahwa 15,97 persen penduduk Indonesia

merupakan penduduk miskin dan dari jumlah tersebut 19,5 persen berada di pedesaan.

Sebelum menganalisis keberdayaan ekonomi, terlebih dahulu haruslah disamakan persepsi tentang ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan merupakan dua konsep yang berbeda. Dainy Tara dalam Benu (2002) Ekonomi Rakyat adalah satuan (usaha) yang mendominasi ragaan perekonomian rakyat, mereka ini memiliki modal yang besar, memiliki akses pasar yang luas, menguasai usaha dari hulu ke hilir, menguasai teknologi produksi dan manajemen usaha modern, sedangkan ekonomi kerakyatan lebih merupakan kata sifat, yakni upaya memberdayakan (kelompok atau satuan) ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha. Kelompok ini merupakan kesatuan individu dengan jenis kegiatan usaha berskala kecil, modal terbatas, teknologi produksi yang sederhana, manajemen usaha yang belum bersistem, dan dengan bentuk kepemilikan usaha secara pribadi.

Keberdayaan ekonomi yang dikaji disini adalah ekonomi kerakyatan (ekonomi petani kecil/miskin). Permasalahannya adalah kelompok ini kurang mendapat perhatian yang wajar dalam kebijakan pembangunan. Keterbatasan finansial (keuangan) yang dimilikinya karena modal kecil, tidak berbadan hukum, dan manajemen yang masih tradisional mengakibatkan usaha ini tidak tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal (bank) yang selalu menerapkan prinsip perbankan dalam memutuskan pelayanan perkreditannya.

Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang dijalankan sejak tahun 2005 melalui kelembagaan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) mencoba mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu guna memberdayakan ekonomi masyarakat miskin termasuk petani. UED-SP merupakan lembaga pedesaan yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa. Sasaran program adalah anggota UED-SP dan masyarakat desa yang memiliki usaha ekonomi produktif. Masyarakat petani dapat memanfaatkan lembaga ini guna mengembangkan kegiatan usahanya melalui kegiatan usaha perorangan maupun dalam bentuk kelompok.

Bagi petani pengajuan kredit kepada lembaga UED-SP adalah untuk mengembangkan usaha, dimana umumnya petani sulit untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki disebabkan karena tidak tersedianya fasilitas pinjaman/kredit. Dengan adanya bantuan kredit yang diperoleh akan dapat mengembangkan usahanya sehingga mampu memberdayakan ekonomi petani guna peningkatan pendapatan yang yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani sehingga mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Tingkat keberdayaan ekonomi produktif petani disajikan pada Tabel 23 berikut.

Tabel 23. Dampak Program Terhadap Keberdayaan Ekonomi Produktif Petani di Kabupaten Rokan Hulu

No	Dampak Program	Skor
1	2	3
2	Keberdayaan ekonomi	
	a. Usaha	16.91
	b. Produksi	10.77
	c. Pemasaran	16.10
	d. Kelayakan Usaha	23.24
	Jumlah	67.40
	Tingkat Keberdayaan	Tinggi

Tabel 23 menggambarkan bahwa kelayakan usaha menunjukkan skor tertinggi dalam menggambarkan tingkat keberdayaan ekonomi produktif petani, hal ini dikarenakan usahatani karet dan sawit digeluti oleh 88,18 persen petani dengan luas lahan rata-rata 3 hektar dan pengalaman usahataninya karet dan sawit (lebih kurang 15 tahun). Kredit yang diperoleh digunakan oleh beberapa petani untuk membeli lahan guna mengembangkan usaha. Dengan pengalaman usahataninya yang cukup lama dan skala usaha yang semakin besar membuat skala usahataninya lebih efisien dan memberikan keuntungan, disisi lain usahataninya sawit merupakan komoditi yang menjanjikan untuk diusahakan karena komoditi ini merupakan komoditi andalan di Kabupaten Rokan Hulu dan merupakan komoditi strategis di Riau.

Indikator faktor produksi memberikan skor terendah terhadap keberdayaan ekonomi petani, faktor ketersediaan modal usaha sangat mempengaruhi kemampuan petani dalam melakukan usaha terutama bagi petani tidak mampu (sangat miskin). Manajemen pengelolaan dana menurut pengelola UED-SP sangat selektif dalam

menentukan peminjam, dana yang dikelola oleh lembaga ini dikelompokkan ke dalam dua katagori yakni kelompok dana UED dan kelompok dana SP. Simpanan pokok dari anggota sebesar Rp. 50.000,- dikelola sebagai dana SP. Dana SP diberikan kepada pemohon dari kelompok tidak mampu atau kelompok sangat miskin. Dana UED bersumber dari dana bantuan pemerintah. Dana ini diberikan kepada peminjam yang memiliki usaha sudah mapan dengan jumlah diatas satu juta rupiah (maksimal Rp 30 juta rupiah).

Petani yang dianggap tidak mampu mengembalikan cicilan hanya dapat memanfaatkan dana pinjaman dibawah satu juta rupiah dari lembaga UED-SP (menghindari resiko kredit macet), akan tetapi bagi petani yang dianggap mampu mengembalikan pinjaman akan dapat mengajukan pinjaman diatas satu juta rupiah dan maksimal Rp 30 juta rupiah. Adanya kesepakatan melalui musyawarah desa yang demikian membuat dana pinjaman hanya bisa dimanfaatkan oleh lebih kurang 90 persen petani mampu dan menengah keatas akan tetapi tidak untuk lapisan petani tidak mampu atau kelompok miskin. Kelompok ini yang hanya bisa memanfaatkan pinjaman lebih kurang 10 persen. Berdasarkan kenyataan diatas terlihat bahwa bantuan pinjaman dana untuk modal usaha lebih banyak bisa dimanfaatkan oleh kelompok yang sudah mapan sehingga faktor ketersediaan modal usaha sangat mempengaruhi kemampuan petani tidak mampu untuk mengembangkan usaha. Program PPD dalam menanggulangi kemiskinan melalui konsep "tridaya" (memberdayakan ekonomi produktif petani) memperlihatkan bahwa tingkat

keberdayaan ekonomi petani hanya dirasakan pada kelompok petani mampu dan menengah ke atas, akan tetapi tidak pada kelompok petani tidak mampu (petani sangat miskin seperti buruh tani). Bantuan ini kurang dirasakan manfaatnya oleh lapisan petani miskin sehingga kelompok ini kurang mampu untuk memberdayakan ekonominya untuk keluar dari kemiskinan. Program kemiskinan belum mampu mengatasi kemiskinan petani. Murjana mengatakan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan belum secara signifikan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Kelemahan berbagai program kemiskinan disebabkan oleh beberapa persoalan antara lain : 1) Program yang dilaksanakan berpedoman pada perguliran dana bantuan, 2) Kecilnya peluang rumah tangga miskin ikut dalam pola perguliran disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, sehingga sangat beresiko terhadap keberhasilan program, dan 3) Program yang cenderung memberik “ikan” bukan kail atau cara memancing (Murjana Yasa, W; I,G. [http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/2\(2\).pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/2(2).pdf) [15/1/2010])

4.3. Keberdayaan Lembaga UED-SP

Lembaga UED-SP sebagai lembaga jasa keuangan berupa Lembaga Kredit Pedesaan (LKP) keberadaannya sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi pedesaan, khususnya sebagai lembaga untuk memfasilitasi jasa pembiayaan usahatani karena fakta menunjukkan hampir sebagian besar petani menghadapi

permasalahan lemahnya permodalan disisi lain lembaga perbankan tidak bisa diakses oleh petani dikarenakan oleh berbagai faktor.

Tujuan pemberian kredit pada masyarakat miskin (termasuk petani miskin) adalah untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki disebabkan tidak tersedianya fasilitas kredit/pinjaman. Dengan adanya pinjaman modal petani bisa melakukan investasi terhadap usahanya sehingga pendapatan yang diterima dari adanya investasi ini akan meningkat. Peningkatan pendapatan yang diperoleh akan berdampak kepada kesejahteraan yang lebih baik, karena mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kelembagaan lokal yang dapat membantu petani dalam mengatasi keterbatasan modalnya di Kabupaten Rokan Hulu adalah lembaga Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP). Lembaga pedesaan ini bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa. Kedepannya lembaga ini diharapkan merupakan cikal bakal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

UED-SP sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dibentuk oleh desa untuk mengelola Dana Usaha Desa dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat. Pengelola UED-SP terdiri dari : Ketua, Kasir, dan Tata Usaha yang merupakan warga masyarakat desa dan berdomisili tetap di desa bersangkutan. Pembentukan Pengelola UED-SP ini dilakukan melalui forum musyawarah desa yang

dipimpin oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pendamping Desa bersama Kader Pembangunan Masyarakat yang disahkan oleh Bupati Rokan Hulu.

Salah satu tujuan dari program PPD adalah pemberdayaan kelembagaan. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat lokal (disini kelembagaan UED-SP) dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaannya. Kapasitas kelembagaan menyangkut bagaimana kemampuan kelembagaan untuk mencapai tujuannya yang diukur dari: Strategi kepemimpinan yang dipakai, perencanaan program, manajemen dan pelaksanaannya, alokasi sumber daya yang dimiliki, dan hubungan dengan pihak luar (Syahyuti, 2003: 86). Uphoff and Esman dalam Tony, 2006:11, menyatakan bahwa kapasitas kelembagaan merupakan proses manajerial.

Kapasitas kelembagaan dalam penelitian ini dilihat dari: 1) strategi kepemimpinan kepala desa dalam menyebarluaskan kriteria pengelola UED-SP dan kriteria pemanfaat, dan kesempatan yang diberikan untuk akses terhadap dokumen pembukuan keuangan PPD oleh pengelola UED-SP, 2) Manajemen dan pelaksanaannya menyangkut bagaimana kesesuaian peran pengelola dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksinya), penyelenggaraan pembukuan UED-SP secara tertib dan lengkap sesuai dengan pedoman pembukuan UED-SP yang telah ditetapkan dan bagaimana kesesuaian laporan bulanan dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis (Pedum dan Juknis) yang disampaikan ke pendamping desa. Alokasi sumber daya yang dimiliki dilihat dari besarnya alokasi dana dan realisasinya, jumlah pemanfaat dan yang menunggak. Hubungan dengan pihak luar digambarkan dari

bagaimana keterbukaan informasi dan publikasi tentang manajemen pengelolaan (hasil musyawarah desa, alokasi dana, besarnya penyerapan, dan nama pemanfaat).

Disamping kapasitas lembaga, kinerja lembaga juga merupakan salah satu indikator dari keberdayaan lembaga. Alokasi sumber daya secara efisien untuk menghasilkan output yang sesuai dengan tujuannya serta relevan dengan kebutuhan pengguna menggambarkan kinerja kelembagaan. Kinerja lembaga UED-SP dapat dilihat dari keefektifan kelembagaan dalam mencapai tujuannya, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan kelembagaan. Penilaian keefektifan dalam penelitian ini dilihat dari: kesesuaian penerima dana dengan kriteria yang diatur dalam Pedum dan Juknis, kesesuaian penggunaan dana dengan proposal yang diajukan oleh peminjam, dan peningkatan jumlah volume dan jenis usaha. Efisiensi diamati dari: jumlah pemanfaat, kelancaran pengembalian dana oleh pemanfaat, dan bagaimana kemampuan lembaga menutupi biaya yang dikeluarkan dari pendapatan yang diperoleh. Tingkat keberdayaan lembaga UED-SP disajikan pada Tabel 24

Tabel. 24. Tingkat Keberdayaan Lembaga UED-SP di Kabupaten Rokan Hulu

No	Dampak Program	Skor
1	2	3
3	Keberdayaan Kelembagaan	
	a. Kapasitas Kelembagaan	29.55
	b. Kinerja Kelembagaan	38.76
	Jumlah	68.31
	Tingkat Keberdayaan	Tinggi

Data pada Tabel 24 memperlihatkan bahwa keberdayaan lembaga UED-SP berada pada katagori “tinggi”. Kapasitas kelembagaan berada pada skor yang lebih rendah dibanding dengan kinerja kelembagaan. Rendahnya kapasitas kelembagaan ini dikarenakan kesempatan untuk akses terhadap dokumen pembukuan UED-SP tidak dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk petani (hanya setahun sekali dalam rapat anggota tahunan UED-SP) dan penyelenggaraan pembukuan UED-SP yang belum begitu tertib dan lengkap sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Hasil audit pendamping desa bahwa pernah ditemukannya laporan pembukuan yang tidak sesuai dengan jumlah dana yang ada di Desa Marga Mulia. Solusi pemecahan permasalahan tersebut yang disarankan pendamping desa adalah dengan memotong honor pengelola UED-SP pada setiap bulannya sehingga kekurangan dana dapat terselesaikan.

4.3.1. Kemampuan Pemanfaatan Dana

Kemampuan memanfaatkan dana secara efisien oleh lembaga UED-SP merupakan salah satu indikator yang mampu menggambarkan kinerja lembaga UED-SP yang bersangkutan. Kemampuan memanfaatkan tersebut digambarkan dari besarnya dana yang tersedia, dana yang terserap, dan jumlah masyarakat (termasuk petani) yang memanfaatkan dana tersebut. Dana yang dianggarkan pada Tahun 2005 di Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp. 3,5 milyar rupiah yang terdiri dari: dana sharing anggaran dari APBD Kabupaten Rokan Hulu dan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 2,5 milyar rupiah yang diberikan untuk 8 desa dengan sistem manajemen

ditangani oleh provinsi. Selanjutnya Kabupaten Rokan Hulu juga menganggarkan dana sebesar Rp. 1 milyar rupiah untuk kegiatan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan yang diberikan untuk 10 desa dengan manajemen pengelolaan oleh Kabupaten Rokan Hulu. Adapun jumlah, serapan dan perkembangan transaksi sejak tahun 2005 hingga bulan Oktober tahun 2008 disajikan pada Tabel 27.

Tabel 25. Sumber Dana, Serapan, dan Perkembangan Transaksi di Tiga Desa Penelitian (Oktober 2008)

N o	Nama Desa	Besar (RP) dan Sumber Dana	Serapan (Rp)	Perkembangan Transaksi (RP) (%)
1	2	3	4	5
1	Rambah Muda	500.000.000 APBD Prov 2005	500.000.000,-	3.523880.000 (5,31)
2	Marga Mulia	450.000.000 APBD Kab 2005/2007	450.000.000,-	2.129.658.000 (3,21)
3	Boncah Kesuma	450.000.000 APBD Kab 2005/2007	450.000.000,-	2.172.399.200 (3,27)
4	Kab. Rokan Hulu	22.000.000.000	23.507.500.000,-	66.411.364.100

Sumber : BPPDKB, Laporan Oktober 2008.

Perkembangan dana transaksi selama tiga tahun pelaksanaan (Tahun 2005 - Oktober 2008) pada Tabel 27 menunjukkan Desa Rambah Muda memiliki perkembangan transaksi sebesar 5,31 % yang lebih tinggi dibanding dua dua desa lainnya yang tingkat perkembangannya hanya 3,21 % dan 3,27 %. Perkembangan transaksi di Kabupaten Rokan Hulu berasal dari 7.245 orang dengan pemanfaat laki-

laki 5.960 orang (82,26 %) dan pemanfaat perempuan yang hanya 1.285 orang (17,73 %) . Pemanfaatan dana UED-SP masih didominasi oleh kaum laki-laki dibanding perempuan namun demikian telah terwakili kaum perempuan sebagaimana harapan.

4.3.2. Tingkat Angsuran

Kinerja lembaga dari sisi efisiensi dalam penelitian ini dilihat dari: tingkat angsuran (pengembalian), tingkat kemacetan (tunggakan) dan tingkat kemandirian lembaga. Tingkat angsuran merupakan besarnya tingkat pengembalian oleh peminjam.

Perbedaan besar dana yang dimanfaatkan antara masyarakat tidak mampu dan yang mampu (dana SP dan dana UED) ternyata mempengaruhi kemampuan pengembalian pinjaman dan besarnya tunggakan. Tabel 26 menggambarkan jumlah peminjam dan tingkat pengembalian (angsuran) di daerah penelitian.

Tabel 26. Besar Tingkat Pengembalian Dana UED dan Dana SP di Kabupaten Rokan Hulu dan di Tiga Desa Penelitian (Oktober 2008)

No	Nama Kabupaten/ Desa	Pengembalian UED		Pengembalian SP	
		Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Ds. Rambah Muda	3.259.083.333,-	93	441.757.100,-	98
2	Ds. Marga Mulya	2.268.258.600,-	99,52	177.579.300,-	98,66
3	Ds. Boncah Kesuma	2.222.340.317,-	95,8	53.077.900,-	84,5
Rata-rata		2.583.227.417	96,11	53.077.900	93,72

Sumber : UED-SP Ds. Rambah Muda, Laporan September 2009
UED-SP Ds. Marga Mulya, Laporan September 2009
UED-SP Ds. Boncah Kesuma, Laporan September 2009

Tabel 26 memperlihatkan bahwa tingkat pengembalian pinjaman UED maupun SP oleh petani di tiga desa penelitian sudah tergolong tinggi, dimana tingkat pengembalian sudah diatas 90 persen dengan batas toleransi tunggakan tidak melebihi 10 persen. Desa Marga Mulia memiliki tingkat pengembalian paling tinggi dibanding dua desa lainnya, di desa ini manajemen pengelolaan pinjaman agar tidak terjadi tunggakan sudah dikatakan bagus, pengelolaan dana UED-SP melibatkan kepala desa, pendamping desa, dan tokoh masyarakat dalam penanganan agar tidak terjadi tunggakan disamping Tata Usaha yang bertugas rutin menjemput ke pemanfaat jika terjadi tunggakan.

Dilihat dari jenis pinjaman yang dimanfaatkan petani data pada Tabel 26 menggambarkan bahwa tingkat kemampuan petani mengembalikan pinjaman yang berasal dari dana UED lebih besar dari petani yang memanfaatkan dana SP. Dapat disimpulkan bahwa petani yang tergolong tidak mampu lebih rendah kemampuan pengembalian angsuran dibanding petani yang tergolong mampu, kondisi demikian disebabkan keterbatasan individu yang tidak mampu (karakteristik individu miskin) sehingga mempengaruhi kemampuan usaha. Hendayana dan Bustaman (2007) menyatakan aspek yang menjadi penghalang dari sisi nasabah (peminjam) dalam mengembalikan angsuran seperti: karakteristik individu, jenis usaha, dan kemampuan usahanya. Untuk itu diharapkan agar besar pinjaman yang diberikan pada petani tidak mampu dapat lebih ditingkatkan dan dibimbing serta diarahkan oleh pendamping desa

sehingga mereka mampu meningkatkan usahanya yang akhirnya akan meningkatkan kemampuan pengembalian pinjaman.

4.3.3. Tingkat Kemacetan

Dana yang diperoleh sebagai tambahan modal usaha penggunaannya bervariasi diantara pemanfaat. Penggunaan dana yang sesuai dengan tujuan pengajuan proposal diharapkan akan mampu meningkatkan kemampuan usaha, akan tetapi penggunaan seperti untuk konsumsi atau membeli barang konsumtif tidak akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan petani.

Kemampuan petani dalam mengembalikan pinjaman (tidak menunggak) menggambarkan bahwa pinjaman yang diperoleh sudah digunakan secara efisien dalam pengembangan usaha. Apabila anggota belum melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pinjaman dikatakan macet. Besar tunggakan petani disajikan dalam Tabel 27.

Data pada Tabel 27 memperlihatkan bahwa pada Tahun 2008 rata-rata persentase tunggakan di tiga desa penelitian lebih kecil dari rata-rata persentase tunggakan di Kabupaten Rokan Hulu, dan sebaliknya lebih tinggi pada tahun 2009. Meningkatnya tunggakan pada tahun 2009 di tiga desa penelitian dikarenakan krisis global yang terjadi pada tahun 2007 yang berdampak sistemik sehingga jatuhnya harga sawit yang juga dirasakan petani di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 27. Nilai Tunggal Dana UED dan Dana SP di Kabupaten Rokan Hulu dan di Tiga Desa Penelitian (Oktober 2008 dan September 2009)

No	Nama Kabupaten/ Desa	Tunggakan UED		Tunggakan SP	
		Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Ds. Rambah Muda				
	a. Okt Tahun 2008	37.487.696,-	3,19	3.745.267,-	5,82
	b. Sept Tahun 2009	186.187.202,-	44,30	19.231.000,-	24,21
2	Ds. Marga Mulya				
	a. Okt Tahun 2008	17.312.662,-	1,47	193.878,-	0,30
	b. Sept Tahun 2009	19.403.004,-	2,03	3.586.111,-	4,17
3	Ds. Boncah Kesuma				
	a. Okt Tahun 2008	41.781.579,-	3,55	2.026.211,-	3,15
	b. Sept Tahun 2009	84.677.351,-	16	9.685.833,-	37,8
	Rata-rata :				
	a. Tahun 2008 :	32.193.979	2,74	1.988.452,-	3,09
	b. Tahun 2009 :	96.755.852	20,78	10.034.314,-	22,06
4	Kab. Rokan Hulu	1.176.326,160,-	3,29	64.341.934,-	5,3

Sumber : BPPDKB, Laporan Oktober 2008

Desa Marga Mulya memiliki persentase tunggakan terkecil pada kedua jenis tunggakan dibanding dua desa lainnya. Kecilnya jumlah tunggakan tidak terlepas dari manajemen penanganan tunggakan yang diterapkan oleh pengurus lembaga UED-SP beserta aparat desa dibanding dua desa lainnya semenjak program PPD digulirkan. Tunggakan yang terjadi satu bulan maka Tata Usaha UED-SP yang mendatangi peminjam guna melunasi tunggakan, masa tunggakan dua bulan melibatkan Ketua

UED-SP bersama Tata Usaha menanganinya, dan masa tunggakan 3 bulan keatas Kepala Desa bersama Ketua UED dan Tokoh Masyarakat serta Pendamping Desa mendatangi peminjam guna melunasi tunggakan. Sistem manajemen pemerintahan desa yang demikian telah mengantarkan Kepala Desa Marga Mulya sebagai Kepala Desa terbaik se Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2006, dan mampu mengantarkan Lembaga UED-SP Mitra Usaha Mulya menjadi UED-SP terbaik pada Tahun 2006 dan 2007 se Kabupaten Rokan Hulu, serta mampu mengantarkan Pendamping Desa mendapat peringkat 3 pada pemilihan pendamping terbaik tingkat Provinsi Riau. Pada 4 Agustus Tahun 2009 Lembaga UED-SP sudah dikukuhkan menjadi Badan Usaha Milik Desa.

4.3.4. Keberlanjutan Lembaga UED-SP

Lembaga UED-SP sebagai salah satu lembaga keuangan mikro diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan. Sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan mikro lembaga ini memiliki ciri : memberikan pelayanan keuangan dalam bentuk simpan pinjam, melayani masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menggunakan sistem dan prosedur yang sederhana.

Kemampuan lembaga UED-SP untuk menutupi seluruh pengeluaran termasuk biaya operasional dari pendapatan yang diperoleh merupakan faktor penentu terhadap keberlanjutan (*sustainability*) dari lembaga tersebut. Besar pendapatan, pengeluaran dan laba atau rugi pada lembaga UED-SP di tiga desa penelitian disajikan pada Tabel 28 dibawah ini.

Tabel 28. Jumlah Pendapatan, Pengeluaran, Rugi atau Laba Lembaga UED-SP di Tiga Desa Penelitian hingga September 2009

Uraian	Desa Rambah Muda	Desa Marga Mulia	Desa Boncah Kesuma
Periode September 2009			
UED :			
1. Pendapatan (Rp)	5.691.300,00	12.634.300,00	9.297.200,00
2. Pengeluaran (Rp)	7.184.853,00	10.042.042,00	7.832.947,00
3. Laba (Rugi) (Rp)	- 1.493.553,00	2.592.158,00	1.464.253,00
SP :			
1. Pendapatan (Rp)	775.000,00	1.867.500,00	306.000,00
2. Biaya (Rp)	0	0	0
3. Laba (Rugi) (Rp)	775.000,00	1.867.500,00	306.000,00
Kumulatif hingga Sept 2009			
UED :			
1. Pendapatan (Rp)	127.553.783,00	27.026.700,00	9.927.200,00
2. Pengeluaran (Rp)	71.797.973,00	19.019.139,00	7.832.937,00
3. Laba (Rugi) (Rp)	55.755.810,00	8.007.561,00	1.464.253,00
SP :			
1. Pendapatan (Rp)	9.233.477,00	3.337.500,00	3.250.166,00
2. Biaya (Rp)	42.983,00	0	45.000,00
3. Laba (Rugi) (Rp)	9.190.494,00	3.337.500,00	3.205.166,00

Sumber : UED-SP Ds. Rambah Muda, Laporan September 2009
UED-SP Ds. Marga Mulya, Laporan September 2009
UED-SP Ds. Boncah Kesuma, Laporan September 2009

Tabel 28 menggambarkan secara umum lembaga UED-SP ditiga desa penelitian keberadaannya mampu untuk terus berlanjut kecuali lembaga UED-SP di Desa Rambah Muda yang mengalami kerugian sebesar Rp 1.493.553,00 dikarenakan pada periode September besar tunggakan di desa ini mencapai Rp 186.187.202,00 (33,30 persen). Keuntungan terbesar diperoleh Desa Marga Mulia pada periode ini dibanding dua desa lainnya yakni Rp 2.592.158,00 yang bersumber dari dana UED dan Rp 1.867.500,00 yang bersumber dari dana SP. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Desa Rambah Muda kedepan harus mampu memperkecil tunggakan agar mampu untuk terus berlanjut.

Secara kumulatif hingga periode September 2009 Desa Rambah Muda memperoleh memperoleh labar terbesar dibanding dua desa lainnya yakni Rp 55.755.810,00 bersumber dari dana UED dan Rp 9.190.494,00 bersumber dari dana SP. Keadaan ini mengantarkan lembaga UED di Desa Marga Mulia mampu meningkatkan status kelembagaannya menjadi lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUUD) pada Agustus 2009.

5. Dampak Program PPD Terhadap Kesejahteraan

Dampak Program Pemberdayaan Desa (PPD) terhadap terhadap petani pada penelitian ini dilihat dari: 1) Profil rumah tangga petani, 2) Struktur pendapatan dan pengeluaran, dan 3) Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

5. 1. Karakteristik Rumah Tangga Petani

Membandingkan karakteristik rumah tangga petani, sebelum menjadi pemanfaat program PPD dan setelah menjadi pemanfaat program PPD merupakan salah satu gambaran dampak program terhadap kesejahteraan petani. Karakteristik rumah tangga petani disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29. Distribusi Responden Pemanfaat Program PPD Berdasar Karakteristik Rumah

No	Karakteristik Rumah	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	2	3	4	5	6
1	Luas Bangunan	74.41		101.40	
	Jumlah	74.41		101.40	
2	Jenis Lantai				
	a. Tanah	22	20.00	3	2.73
	b. Kayu	1	0.91	1	0.91
	c. Semen	87	79.09	106	96.36
	Jumlah	110	100.00	110	100.00
3	Jenis Dinding				
	a. Bambu	0	0.00	0	0.00
	b. Papan	57	51.82	42	38.18
	c. Tembok	53	48.18	68	61.82
	Jumlah	110	100.00	110	100.00
4	Fasilitas Buang Air Besar				
	a. Tidak ada	9	8.18	3	2.73
	b. Bersama	1	0.91	0	0.00
	c. Sendiri	100	90.91	107	97.27
	Jumlah	110	100.00	110	100.00
5	Sumber Penerangan				
	a. Teplok	23	20.91	1	0.91
	b. Petromak	4	3.64	1	0.91
	c. Listrik	83	75.45	108	98.18
	Jumlah	110	100	110	100
6	Sumber Air Minum				
	a. Sungai	2	1.82	1	0.91
	b. Sumur	108	98.18	107	97.27
	c. Ledeng	0	0.00	2	1.82
	Jumlah	110	100	110	100

Tabel 29 menggambarkan telah terjadi peningkatan luas bangunan dari 74,41 m² menjadi 101,40 m² setelah mengikuti program PPD. Jenis lantai rumah yang terbuat dari semen dan jenis dinding yang terbuat dari tembok juga persentasenya mengalami peningkatan dari 79,09 persen menjadi 96,36 persen dan dari 48,18 persen menjadi 61,82 persen . Penggunaan sumber penerangan listrik dan sumber air minum yang bersumber dari sumur juga mengalami peningkatan dari 75,45 persen menjadi 98,18 persen, bahkan terdapat responden yang sudah menggunakan ledeng (sumur bor) sebesar 2 persen setelah menjadi peserta program PPD. Fasilitas buang air besar milik sendiri meningkat dari 90,91 persen menjadi 97,27 persen. Kondisi rumah tersebut menggambarkan bahwa program memberikan dampak terhadap perubahan kualitas perumahan yang dimiliki.

Kemampuan konsumsi dan jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak, kemampuan membeli pakaian baru dan kemampuan untuk berobat dari rumah tangga reponden juga merupakan indikator yang mampu menggambarkan kesejahteraan petani disamping kondisi rumah petani yang disajikan pada Tabel 30.

Kemampuan konsumsi dilihat dari frekuensi makan dan jenis makanan yang dikonsumsi serta bahan bakar yang digunakan untuk memasak makanan tersebut. Kemampuan konsumsi pakaian dilihat dari jumlah pakaian yang mampu dibeli dalam setahun, sedangkan kemampuan berobat dilihat dari kemampuan untuk pergi ke Puskesmas

Tabel 30. Distribusi Responden Pemanfaat Program PPD Berdasar Kemampuan Konsumsi dan Berobat ke Puskesmas

No	Konsumsi/Berobat	Sebelum PPD		Setelah PPD	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	2	3	4	5	6
1	Bahan Bakar Untuk Memasak				
	a. Kayu	59	53.64	32	29.09
	b. Minyak	44	40.00	60	54.55
	c. Gas	7	6.36	18	16.36
	Jumlah	110	100.00	110	100.00
2	Konsumsi Daging/Susu/Ayam per Minggu:				
	a. Tidak Ada	9	8.18	4	3.64
	b. Hanya Sekali	44	40.00	47	42.73
	c. Lebih dari Sekali	57	51.82	59	53.64
	Jumlah	110	100.00	110	100.00
	Jumlah				
4	Makan Dalam Sehari Setiap Anggota Keluarga :				
	a. Sekali	0	0.00	0	0.00
	b. Dua Kali	1	0.91	0	0.00
	c. Lebih dari Dua Kali	109	99.09	110	100.00
	Jumlah	110	100,00	110	100,00
3	Membeli Pakai Baru Untuk Anggota Keluarga Dalam Setahun :				
	a. Tidak Ada	2	1.82	0	0.00
	b. Hanya 1 Stel	25	22.73	19	17.27
	c. Lebih dari 1 Stel	83	75.45	91	82.73
	Jumlah	110	100,00	110	100,00
5	Kemampuan Berobar ke Puskesmas				
	a. Tidak Mampu	4	3.64	2	1.82
	b. Mampu	106	96.36	108	98.18
	Jumlah	110	100.00	110	100.00

Tabel 30 menggambarkan bahwa bahwa frekuensi makan lebih dari dua kali dalam sehari, kemampuan mengkonsumsi daging/ayam/susu lebih dari sekali dalam seminggu persentasenya mengalami peningkatan dari 99,09 persen menjadi 100,00

persen dan 51,82 persen menjadi 53,64 persen setelah menjadi peserta program PPD, begitu juga dengan jenis bahan bakar minyak dan gas yang digunakan dalam memasak makanan dari 6,36 persen menjadi 16,36 persen.

Kemampuan responden dalam membeli pakaian lebih dari 1 stel dalam setahun dan pergi berobat ke Puskesmas persentasenya mengalami peningkatan dari 75,45 persen menjadi 82,73 persen dan 96,36 persen menjadi 98,18 persen . Dapat dikatakan bahwa program PPD mampu meningkatkan kemampuan responden dalam mengkonsumsi makanan dan pakaian serta dalam berobat ke Puskesmas.

5.2. Struktur Pendapatan

Peningkatan pendapatan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program yang dilaksanakan. Konsep yang digunakan adalah mengukur dan membandingkan pendapatan petani sebelum dan setelah adanya program. Struktur pendapatan menggambarkan sumber pendapatan keluarga petani dari sektor mana.

Pendapatan petani pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu pendapatan dari sektor pertanian dan dari sektor diluar pertanian. Pendapatan dari sektor pertanian merupakan kontribusi pendapatan dari usahatani (seperti padi, palawija, perkebunan dan lainnya) dan di luar usahatani seperti berburuh tani. Pendapatan diluar pertanian merupakan pendapatan diluar usaha pertanian (seperti berdagang, bekerja sebagai buruh, angkutan, industri dan lainnya). Tabel 31

menggambarkan struktur pendapatan rumahtangga petani peserta program PPD di desa penelitian.

Tabel 31. Struktur Pendapatan RumahTangga Responden Pemanfaat Program PPD (Rp/bulan)

No	Uraian	PENDAPATAN			
		Sebelum PPD		Sesudah PPD	
		Jumlah (Rp)	Pangsa a %	Jumlah (Rp)	Pangsa %
1	2	3	4	5	6
A.	PENDAPATAN	4.095.915,11	100,00	5.845.815,15	100,00
I	Pertanian	3.426.769,65	81,07	4.268.769,69	73,02
	a. Usahatani	3.378.460,56	79,93	4.186.906,05	71,92
	1. Padi	158.481,82	3,75	15.754,55	0,27
	2. Palawija	69.909,09	1,65	0,00	0,00
	3. Hortikultura	36.454,55	0,86	1.818,18	0,03
	4. Perkebunan	2.982.863,64	70,57	3.992.636,36	68,30
	5. Perikanan	1.363,64	0,03	129.545,45	2,22
	6. Peternakan	129.387,84	3,06	47.151,51	1,10
	b. Luar Usahatani	48.309,09	1,14	81.863,64	1,40
	1. Buruh Pertanian	46.490,91	1,10	79.590,91	1,36
	2. Menyewakan aset	1.818,18	0,04	2.272,73	0,04
II	Non- Pertanian	669.145,45	15,83	1.577.045,45	26,98
	1. Perdagangan	392.727,27	9,29	1.121.818,18	19,19
	2. Angkutan	0,00	0,00	681,82	0,01
	3. Jasa	210.509,09	4,98	371.363,64	6,35
	4. Industri	52.727,27	1,25	66.363,64	1,14
	5. Buruh	9.090,91	0,22	13.181,82	0,23
	6. Kiriman	4.090,91	0,10	3.363,36	0,06

Hasil analisis struktur pendapatan pada tiga desa penelitian menggambarkan terjadi peningkatan pendapatan setelah adanya program PPD yakni dari Rp 4.095.915,11 menjadi 5.845.815,15. Kontribusi sektor pertanian terhadap

pendapatan rumah tangga petani (81,07 persen dan 73,02 persen) lebih besar dibanding di luar pertanian (15,83 persen dan 26,98 persen). Hal ini menggambarkan bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan rumah tangga. Kontribusi sektor pertanian yang sangat besar terhadap total pendapatan rumah tangga baik sebelum maupun sesudah adanya program dikarenakan sebagian besar petani mengusahakan tanaman perkebunan (sawit yang merupakan komoditi primadona) sebagai sumber mata pencaharian utama rumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memegang peranan penting di desa penelitian.

Kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan rumah tangga menurun dari 81,07 persen menjadi 73,02 persen setelah adanya program PPD, menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan rumah tangga dikarenakan menurunnya kontribusi usahatani perkebunan (anjloknya harga sawit) akibat krisis global yang terjadi. Keadaan krisis yang terjadi mengakibatkan sebagian dari petani lebih berkosertrasi pada usaha perdagangan dibanding mengelola kebun sawitnya karena pendapatan yang diperoleh pada usahatani sawit pada saat itu tidak mampu menutupi biaya produksi usahatani sawit tersebut. Keadaan ini ditunjukkan dengan meningkatnya kontribusi usaha perdagangan dari 9,29 persen menjadi 19,19 persen.

Kontribusi pendapatan di luar sektor pertanian meningkat dari 15,83 persen menjadi 26,98 persen, kontribusi terbesar adalah sektor perdagangan (9,29 persen menjadi 19,19 persen dan selanjutnya diikuti dengan sektor jasa (4,98 persen menjadi

6,35 persen. Kondisi ini menggambarkan telah terjadi pergeseran jenis usaha keluar sektor pertanian (perdagangan dan jasa) yang dapat dilakukan petani untuk memperoleh pendapatan.

5.3. Struktur Pengeluaran

Struktur pengeluaran rumah tangga pada penelitian ini dikelompokkan kedalam dua katagori besar berdasarkan kebutuhan, yaitu kebutuhan akan pangan dan non-pangan. Perilaku pengeluaran rumah tangga yang tersedia sesuai dengan kemampuan pendapatan yang diperoleh dan bagaimana mendistribusikannya.

Komposisi pengeluaran terdistribusi kedalam 9 katagori antara lain : pengeluaran untuk karbohidrat, hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah dan bumbu, rokok dan lain-lain. Pengeluaran non pangan dikelompokkan kedalam pengeluaran untuk bukan bahan bakar yang terdiri dari 7 katagori (pakaian, pendidikan, kesehatan dan lainnya) dan bahan bakar yang terdiri dari 4 katagori (bensin dan solar, listrik, kayu bakar dan elpiji). Lebih jelasnya disajikan pada Tabel 32 dibawah ini.

Tabel 32. Struktur Pengeluaran RumahTangga Responden Pemanfaat Program PPD per Bulan (Rp)

No	Uraian	PENGELUARAN			
		Sebelum PPD		Sesudah PPD	
		Jumlah (Rp)	Pangsa %	Jumlah (Rp)	Pangsa %
1	2	3	4	5	6
B.	PENGELUARAN	1.692.806,66	100,00	2.809.774,05	100,00
I	Pangan	748.600,00	44,22	1.060.854,55	37,76
	1. Karbohidrat	154.636,36	9,13	220.472,73	7,85
	2. Hewani	197.636,36	11,67	275.972,73	9,82
	3. Kacangan	63.363,64	3,74	84.790,91	3,02
	4. Sayur dan buah	83.140,91	4,91	114.572,73	4,08
	5. Minyak/ Lemak	38.404,55	2,27	51.468,18	1,83
	6. Minuman	50.972,73	3,01	75.486,36	2,69
	7. Bumbu	60.945,45	3,60	83.718,18	2,98
	8. Rokok	77.490,91	4,58	119.454,55	4,25
	9. Lainnya	22.109,09	1,31	34.918,18	1,24
II	Non-Pangan	944.206,66	55,78	1.748.919,51	62,24
	a. Non-Bahan baker	757.106,66	44,73	130.851,33	49,50
	1. Pakaian	117.658,79	6,95	153.365,32	5,46
	2. Pendidikan	314.242,43	18,56	498.377,27	17,74
	3. Kesehatan	73.300,00	4,33	128.822,73	4,59
	4. Renovasi	11.818,18	0,70	48.440,15	1,72
	5. Sosial & Kiriman	27.590,91	1,63	67.948,45	2,42
	6. Pajak & Iuran	164.475,15	9,72	274.551,05	9,77
	7. Rekreai/Transport	75.000,00	2,84	219.346,35	7,81
	b. Bahan Bakar	187.100,00	11,05	358.068,18	12,74
	1. Bensin, Solar &Minyak	113.290,91	6,69	248.695,45	8,85
	2. Listrik	57.490,91	3,40	84.200,00	3,00
	3. Kayu Bakar	5.727,27	0,34	12.054,	0,04
	4. Elpiji	10.590,91	0,63	13.118,18	0,47

Tabel 32 diatas menggambarkan secara nominal telah terjadi peningkatan pengeluaran dari Rp 1.692.806,66 menjadi Rp 2.809.774,05 setelah adanya program PPD. Distribusi pengeluaran untuk non pangan (55,78 persen meningkat menjadi

62,24 persen setelah adanya program PPD) lebih besar dari pengeluaran untuk pangan yang hanya (44,22 persen dan menurun menjadi 37,76 persen setelah program PPD). Keadaan ini menggambarkan bahwa telah terjadi peningkatan pengeluaran untuk non pangan dan penurunan pengeluaran non pangan. Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk bisa bertahan hidup secara sehat, maka seseorang akan mengalokasikan pengeluaran untuk pangan terlebih dahulu, berikutnya mengalokasikan pengeluaran untuk non pangan. Pengeluaran untuk pangan proporsi terbesar adalah untuk pangan hewani (11,67 persen sebelum program PPD dan 9,82 persen setelah adanya program PPD) yang diikuti pengeluaran untuk karbohidrat (9,13 persen sebelum adanya program dan 7,85 persen setelah adanya program PPD).

Seiring dengan peningkatan pendapatan dari Rp 4.226.824,20 menjadi Rp 5.845.815,15 setelah adanya program PPD, telah terjadi penurunan pengeluaran untuk pangan dan meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan non pangan. Proporsi terbesar pada pengeluaran non pangan adalah untuk pendidikan (18,56 persen dan 17,74 persen setelah adanya program PPD). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anggota keluarga sudah semakin besar.

Pangsa pengeluaran untuk pangan lebih rendah dibanding pangsa pengeluaran non pangan, dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan petani di desa penelitian sudah dapat dikatakan sejahtera. Kondisi tersebut didukung pendapat Ariani dan Rachman, secara empiris semakin tinggi pendapatan rumah tangga semakin rendah

pangsa pengeluaran untuk pangan. Rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan tinggi tergolong dengan rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rendah relatif dibandingkan dengan proporsi pengeluaran untuk pangan yang rendah (Ariani, et, al, 2000 dan Rachman, HPS, 2001)

5.4. Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam melihat kemiskinan adalah pendekatan kebutuhan dasar (*Basic Need Approach*). Pendekatan ini melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Tabel 23 berikut ini menggambarkan tingkat kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Tabel 33. Tingkat Kemampuan Petani dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar

No	Jenis Kebutuhan Dasar	Skor
1	2	3
	1. Pangan	75,59
	2. Kesehatan	71,05
	3. Pendidikan	71,68
	4. Kesempatan	68,85
	5. Perumahan	70,30
	6. Air	81,45
	7. Lahan	69,91
	8. Sumber Daya	69,91
	9. Rasa Aman	79,27
	Jumlah	73,11
	Tingkat Kemampuan	Tinggi

Data pada Tabel 33 menggambarkan bahwa tingkat kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan dasar berada pada katagori tinggi (skor lebih besar dari 60) pada 9 jenis kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar tertinggi yakni pada jenis pemenuhan kebutuhan akan air hal ini didukung oleh adanya kegiatan pembuatan sumur bor dari adanya program P2KP, selanjutnya diikuti oleh jenis kebutuhan pangan. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan petani sudah tinggi yang ditandai dengan menurunnya proporsi pengeluaran untuk pangan yang beralih pada meningkatnya proporsi pengeluaran untuk non pangan seperti yang disajikan pada Tabel 32.

Pendidikan memiliki tingkat kemampuan tinggi setelah pangan (skor 71,68). Kondisi ini didasarkan pada sudah tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan guna meningkatkan kemampuan sumber daya petani dalam mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi. Tingkat pengeluaran untuk pendidikan merupakan proporsi pengeluaran terbesar pada pengeluaran non pangan (Tabel 32).

6. Partisipasi Dalam Pembangunan Desa

Dalam pembangunan desa, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan dalam sesuatu yang ditawarkan. Pada penelitian ini tindakan petani untuk berpartisipasi tidak lepas dari kemampuan diri yang dimiliki serta perhitungan untung rugi. Tabel 34 berikut merupakan tingkat partisipasi petani dalam pembangunan desa setelah adanya program PPD.

Tabel 34. Partispasi Petani dalam Pembangunan Desa

No	Partisipasi	Skor (%)
1	2	3
	1. Perencanaan	64,50
	2. Pelaksanaan	64,30
	3. Pemantauan dan Evaluasi	61,42
	4. Pemanfaat	68,91
	5. Pemelihara	68,55
	Jumlah	73,11
	Tingkat Partisipasi	Tinggi

Tabel 34 menggambarkan bahwa tingkat partisipasi petani dalam pembangunan desa berada pada katagori tinggi yakni 73,11 yang lebih besar dari 60. Tingkat partisipasi tertinggi pada memanfaatkan program pembangunan yang terdapat di desa (68,55 persen) dan terendah dalam memantau dan mengevaluasi program pembangunan desa yang dijalankan.

Tingginya partisipasi petani dalam memanfaatkan program dapat tergambar dari berkembangnya perekonomian masyarakat desa dan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah yang selama ini masyarakat cenderung untuk bersikap tidak mau tahu dan apatis. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dibuktikan dengan tingkat pengembalian pinjaman yang mencapai 96,11 persen (Tabel 26).

Craig dan May (1995) dalam Hikmat (2004) menyatakan bahwa partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Dengan berpartisipasi aktif, akan menumbuhkan kesadaran dan rasa

tanggung jawab masyarakat yang tercermin dengan adanya perubahan sikap mental, cara berpikir, dan cara bekerja (Khairuddin, 2000).

Kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat tercermin dari timbulnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi seperti Kartu Keluarga, KTP, Surat Tanah, Surat Nikah dan lain sebagainya. Hal ini didukung oleh aktifnya kelembagaan desa yang ditandai dengan keaktifan dari aparatur desa masuk kantor sebagai akibat dari aktifnya lembaga UED-SP yang terdapat di desa tersebut. Disisi lain masuknya sistim Komputerisasi di desa melancarkan tugas-tugas yang diperankan oleh aparatur desa dalam merancang pembangunan desa.